



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Republika

Proyek LRT Dikhawatirkan Makin Lama Makin Mangkrak

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Pembangunan proyek lintas raya terpadu atau *light rail transit* (LRT) dikhawatirkan akan makin lama mangkrak setelah tidak masuk dalam rencana APBD DKI 2023. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menanggapi serius kelanjutan proyek LRT.

"Kesan menjegal pembangunan kelanjutan LRT ini dari pihak Dishub semakin menguat karena tidak ada anggaran yang dimasukkan dalam KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2023, artinya LRT ini akan semakin lama mangkrak," kata Gilbert dalam keterangannya, Rabu (2/11).

Menurut Gilbert, proyek LRT yang telah dibangun dari Velodrom-Kelapa Gading bisa terbengkalai tanpa adanya kelanjutan pembangunan fase kedua. Dia menilai, jika proyek LRT dilanjutkan pada masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, dapat menekan harga tiket. Dengan tidak adanya kelanjutan proyek LRT pada tahun depan, Gilbert mengatakan, akan ada subsidi per tiket yang memotong *public service obligation* (PSO) dengan sangat besar.

"Seharusnya trayek lanjutan bisa dibuat selama lima tahun era Anies agar harga tiket menjadi rasional karena jalurnya menjangkau banyak lokasi sehingga jumlah penumpang dapat tercapai," ujar dia.

Gilbert mengungkapkan alasan Dinas Perhubungan yang menyebut pem-

angunan LRT terhambat regulasi tidak pernah diungkapkan selama pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Menurut Gilbert, proyek LRT Jakarta merupakan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, Perpres nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), dan Perpres Nomor 79 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Provinsi DKI Jakarta. "Pernyataan Kadishub tersebut soal tersendat karena regulasi ini menjadi tidak tepat, karena justru sudah ada Perpres yang dikeluarkan mengenai hal ini, tetapi tidak satupun LRT yang dibangun selama lima tahun di era Anies," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, regulasi yang belum rampung menyebabkan pembangunan proyek LRT Jakarta fase kedua tersendat.

"Untuk LRT memang kami masih fokus kepada bagaimana penyiapan regulasinya, karena sejak tahun 2015, sampai beberapa kali dilakukan memang terpantau selalu gagal," kata Syafrin di Jakarta, Selasa (1/11).

Syafrin enggan menjelaskan secara rinci regulasi seperti apa yang membuat proyek LRT itu terhambat. Namun, Dishub DKI Jakarta saat ini fokus mencari cara menyelesaikan regulasi tersebut. "Salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah dari sisi regulasi. Oleh sebab itu, sekarang kami masih fokus pada bagaimana penyelesaian

regulasinya," kata dia.

Tidak adanya rencana pembangunan lanjutan LRT Jakarta diungkap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Jumat (28/10). "Belum ada pembangunan LRT tahun 2023. Nanti kita lihat anggaran di DKI. Masih ada opsi-opsi," kata Heru.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta untuk sementara akan mengutamakan hal-hal yang lebih mendesak. Dia menyebut, hal yang paling utama dijaga saat ini adalah situasi ekonomi.

Meskipun begitu, Heru menyebutkan, bukan tidak mungkin kelanjutan pembangunan LRT Jakarta fase kedua ini bisa diwujudkan pada kepemimpinan gubernur terpilih pada Pilkada 2024.

■ antara ed: nur aini